

Kinerja dan  
legitimasi:  
lembaga nasional hak  
asasi manusia

**Ikhtisar Temuan**

*Banyak komisi nasional hak asasi manusia telah dibentuk dalam dasawarsa terakhir. Dokumen ini merangkum temuan sebuah proyek penelitian guna meneliti taraf keberhasilan lembaga bersangkutan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di masyarakatnya. Dokumen ini meneliti apa saja yang telah dilakukan dengan baik oleh NHRI dan, berdasarkan pengalaman lembaga spesifik di serangkaian negara, apa yang dapat mereka lakukan guna menjadi lebih efektif. Laporan lengkap mengenai penelitian ini, termasuk rekomendasi terperinci, tersedia pada Dewan Internasional.*

Beberapa komentar mengenai Kinerja dan Legitimasi – lembaga nasional hak asasi manusia, yang diterbitkan oleh Dewan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2000:

*“Karya yang sangat baik... Tambahan yang disambut baik bagi studi lembaga nasional... karya terbaik yang telah saya baca mengenai hal ini.”*

Kieren Fitzpatrick, Direktur, Forum Asia Pasifik mengenai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia

*“Serius, tersusun baik, dan mudah dibaca.”*

Augusto Sánchez Sandoval,  
Professor, Universidad Nacional Autónoma de Mexico

*“Studi terperinci pertama... yang menyediakan evaluasi atas keefektifan, bukan sekedar menguraikan struktur dan proses formal.”*

Chris Sidoti, anggota komisi pada Australian Human Rights and Equal Opportunity

*“Laporan ini secara mengagumkan jelas dan membuat banyak pengamatan berharga serta menyediakan berbagai informasi yang sebelumnya belum pernah tersedia”*

Sarah Spencer, Director, Program Kewarganegaraan dan Pemerintahan, Lembaga untuk Riset Kebijakan Umum, London.

*“Sebuah studi komprehensif yang memuat refleksi analitis serta informasi luas yang sangat berharga bagi lembaga mereka sendiri dan bagi mereka yang bekerja di lapangan.”*

Lone Lindholt, Analis Riset dan Pembangunan Legal Senior, Pusat Hak Asasi Manusia Denmark

**International Council on Human Rights Policy**  
**48, chemin du Grand-Montfleury**  
**P.O. Box 147,**  
**CH-1290 Versoix, Switzerland**  
**Tel: (41 22) 775 3300**  
**Fax: (41 22) 775 3303**  
**Email: [ichrp@international-council.org](mailto:ichrp@international-council.org)**  
**Web: <http://www.international-council.org>**

**ISBN 2-940259-08-9**

## TEMUAN

Lembaga nasional hak asasi manusia (NHRI) mempunyai banyak bentuk, sebagai ombudsman, defensores del pueblo, kuasa, dan komisi penasihat dan anti-diskriminasi. Wewenang mereka secara konstitusional mungkin kuat atau mereka mungkin hanya memiliki kekuasaan memberi saran dengan sedikit proteksi hukum dari campur tangan eksekutif. Mereka juga beroperasi dalam konteks politik yang sangat berlainan – demokrasi industri, masyarakat miskin, negara dalam peralihan dari rejim opresif. Proyek ini mendefinisikan mereka sebagai lembaga kuasi-pemerintah atau perundang-undangan otonom dengan hak asasi manusia dalam mandat mereka.

Pada tahun 1991, standar minimum bagi NHRI telah disepakati di lokakarya internasional di Paris. "Prinsip Paris" menganjurkan agar negara membentuk lembaga nasional yang independen untuk (i) mempromosikan hak asasi manusia, (ii) memberi saran kepada pemerintah mengenai perlindungan hak asasi manusia, (iii) meninjau perundang-undangan hak asasi manusia, (iv) menyiapkan laporan hak asasi manusia, dan (v) menerima dan menyelidiki pengaduan dari masyarakat. Di bawah pengaruh mereka, banyak lembaga nasional telah terbentuk selama tahun 1990an dan semua NHRI kini memainkan peran dalam perlindungan dan promosi hak asasi manusia di banyak sekali negara.

Apakah NHRI efektif? Keanekaragamannya, dan juga kisaran konteks politik di mana NHRI berfungsi, menjadikan pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Mengapa beberapa NHRI menimbulkan dampak kecil saja meskipun menerapkan Prinsip Paris. Mengapa beberapa NHRI lainnya sangat dihormati meskipun tampaknya mereka dikompromi atau secara konstitusional cacat? Sebagian besar penelitian mengenai lembaga ini memfokuskan pada isu normatif dan hukum – bagaimana terbentuknya dan apa sasarannya. Namun demikian, akhirnya, berguna atau tidaknya organisasi ditentukan oleh apa yang dilakukannya dan bagaimana organisasi bersangkutan dilihat oleh mereka yang dilayaninya. Studi ini dengan demikian memfokuskan pada apa yang dilakukan oleh NHRI dan atas perlakuannya terhadap kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Ini adalah studi beberapa kasus nyata, yang terpilih bukan karena merupakan contoh 'terbaik' atau 'terburuk' namun karena bersifat representatif atas berbagai jenis pengalaman. Meskipun generalisasi yang berada di luar konteks tidak akan membantu, umumnya kami menemukan bahwa semua NHRI yang paling berhasil beroperasi dengan baik pada beberapa tingkat. Terutama, kesemua NHRI ini dipersepsikan sebagai sah, membuat mereka menjadi aksesibel, dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan lembaga yang relevan dalam masyarakat sipil dan pemerintah.

## PROSES RISET

Studi lembaga nasional hak asasi manusia (NHRI=National Human Rights Institution) dilakukan antara Oktober 1998 dan November 1999. Studi ini mengkaji bagaimana efektifnya kesemua lembaga tersebut mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Para periset meneliti mandat NHRI; teknik penyelidikan; legitimasi dan taraf komitmen; kemampuan menangani kasus; formasi dan sejarah; dan bagaimana masing-masing NHRI menerapkan norma hak asasi manusia internasional. Tim riset mempertimbangkan tiga pertanyaan utama:

- Di bawah kondisi apa NHRI memperoleh legitimasi umum – tidak hanya konstitusional?
- Sejauh mana kelompok sosial yang rentan (terhadap pelanggaran hak asasi manusia) mempunyai akses efektif ke pelayanan NHRI?
- Sampai taraf mana badan lain di dalam maupun di luar pemerintah mempengaruhi pekerjaan NHRI?

Peneliti kepala, Richard Carver, melakukan penelitian tangan pertama di Ghana, Indonesia, dan Meksiko. Sejumlah konsultan penelitian lokal membimbingnya serta memberi saran kepadanya di setiap negara. Ia juga melakukan kunjungan singkat ke Afrika Selatan dan Zimbabwe dan melaksanakan penelitian sekunder atas NHRI di Kanada, Guatemala, India, Latvia, Selandia Baru, Nigeria, Pilipina, Spanyol, dan Togo.

Seleksi mengenai lembaga yang diteliti adalah dengan mempertimbangkan perbedaan regional, sistem politik dan hukum, konteks (negara dalam transisi, negara yang melanggar hak asasi manusia), bentuk kelembagaan (komisi, ombudsman), yayasan hukum (konstitusi, undang-undang, keputusan presiden), dan catatan aktivitas. Di tiap negara, tim peneliti menemui lembaga nasional hak asasi manusia, pejabat pemerintah dan peradilan, Ornop, dan organisasi berbasis masyarakat. Para pewawancara menyusun daftar pertanyaan inti mencakup landasan hukum lembaga, aksesibilitasnya, struktur, mandat dan yurisdiksi, kuasa (penyelidikan, penegakan, pendidikan, pelatihan), serta hubungan dengan masyarakat sipil, badan pemerintah dan internasional.

Pada bulan Agustus 1999, Dewan (*The International Council On Human Rights Policy*) mengirimkan rancangan laporan untuk komentar kepada 250 individu dan lembaga di 59 negara. 77 jawaban yang diterima disusun dan diintegrasikan ke dalam rancangan final yang diselesaikan pada bulan November 1999. Dewan menerbitkan *Kinerja dan Legitimasi, lembaga nasional hak asasi manusia pada* bulan Maret 2000. Ikhtisar Temuan ini telah diproduksi secara berbarengan dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Indonesia.

## TIM PENELITIAN

Dr. Mohammad-Mahmoud Mohamedou merancang dan mengelola proyek ini. Ia adalah direktur riset di Dewan Internasional.

Richard Carver menulis laporan utama atas mana ikhtisar ini didasarkan dan studi kelayakan semula dari mana proyek ini disusun. Ia mulai bekerja pada bulan Oktober 1998, mengunjungi Jakarta dan Irian Jaya pada tanggal 11-28 Januari 1999, Mexico City dan Guadalajara State bersama Dr. Mohamedou pada tanggal 6-19 April, dan Accra dan Ashanti dan kawasan Utara Ghana pada tanggal 8-25 Juni.

Sebuah kelompok penasihat memberi bimbingan dan pengarahan umum. Kelompok penasihat ini bertemu di Jenewa pada bulan November 1998, mengadakan tiga konferensi telepon dalam rangka penyelenggaraan penelitian, dan bertemu kembali pada bulan Oktober 1999 guna menyetujui laporan akhir dan menyetujui rekomendasi. Para anggotanya ialah:

**Dr. Kamal Hossain** (Ketua), pengacara senior di Mahkamah Agung Bangladesh;  
**Mercedes V. Contreras**, Komisaris, Komisi Pilipina mengenai Hak Asasi Manusia;  
**Ian Hamilton**, Direktur, Program Lembaga Nasional, Yayasan Hak Asasi Manusia Kanada;

**Dr. Juan E. Méndez**, kemudian Direktur Eksekutif, Lembaga Antar-Amerika mengenai Hak Asasi Manusia.

**Dr. N. Barney Pityana**, ketua, Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan.

Konsultansi peneliti lokal adalah:

**Dr. Nii Ashie Kotey**, dosen senior di Fakultas Hukum, Universitas Ghana;

**Denny Yomaki**, Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya,

**Benny Giay**, Universitas Cenderawasih, Jayapura,

**Hendy Lukito**, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia;

**Aída María Noval**, dokumentalis hak asasi manusia, Meksiko,

**Phil Gunson**, peneliti independen, Meksiko.

Proyek ini didanai oleh Yayasan Ford, Amerika Serikat, serta hibah dari Pemerintah Federal Swiss.

Diterbitkan pada tahun 2000 oleh Dewan Internasional mengenai Kebijakan Hak Asasi Manusia, Versoix, Swiss. Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Hendy Lukito. Seluruh hak dilindungi. © Hak cipta 2000 Dewan Internasional mengenai Kebijakan Hak Asasi Manusia.

Ilustrasi sampul: © The British Museum. Heiroglif. Rincian daftar nama raja yang ditemukan di kuil Ramesses II pada Dinasti Kesembilan belas Abydos, sekitar tahun 1300 SM.

ISBN 2-940259-08-9

Desain & tata letak oleh: Aplin Clark, London, Inggris

Dicetak oleh: Imprimerie SADAG, Bellegarde/Valserine, Perancis.

## Memperoleh Legitimasi

Dasar konstitusional yang sehat merupakan jaminan legitimasi terbaik. NHRI memperoleh sebagian besar legitimasi publik bilamana lembaga ini menjadi mapan dari segi hukum. Adalah lebih baik untuk terbentuk menurut hukum parlemen ketimbang oleh keputusan presiden dan malah lebih baik lagi jika mempunyai proteksi konstitusional. Bagaimanapun juga, legitimasi masih harus diperjuangkan.

Mutu staf merupakan faktor utama. Staf senior cenderung untuk diangkat dari kalangan pemerintahan dan banyak dari mereka adalah pengacara. Sejumlah kecil lembaga telah merekrut secara berarti dari Ornop atau kelompok rentan (seperti wanita dan minoritas). Memperluas basis pengangkatan akan meningkatkan dengan tajam kredibilitas dan daya tarik beberapa NHRI.

Kredibilitas juga tergantung langsung pada bagaimana pengaduan dikelola. Mekanisme pengaduan yang efisien – berbiaya rendah, cepat, mudah dipahami, tidak birokratis – dapat meraih kepercayaan masyarakat. Sungguh vital untuk memantau kepatuhan, terutama dalam hal yang menimbulkan tuntutan.

Banyak NHRI memperlakukan pengaduan dalam isolasi sehingga muatan kasusnya tidak berkesinambungan. Pengaduan individuil dapat ditangani dengan cara yang mempunyai fungsi pendidikan dan preventif lebih luas. Banyak NHRI akan menjadi lebih efektif jika berkonsentrasi pada bidang masalah utama dan mengidentifikasi kelompok rentan (yakni, anak-anak, wanita, narapidana, orang cacat, dan lain-lain). Penting untuk mengkomunikasikan prioritas terpilih kepada pemerintah, masyarakat, dan kelompok rentan.

Beberapa NHRI menyelesaikan kasus melalui konsiliasi sedangkan beberapa lainnya mempunyai pendekatan yang lebih bersifat penuntutan. Komisi yang paling dihormati menangani isu politik peka, seperti korupsi politis dan tabu sosial. Tampaknya intervensi demikian menetapkan kredibilitas dan reputasi sifat independennya.

## Aksesibilitas

Di mana saja NHRI telah melakukan usaha agar dapat diakses, misalnya dengan membuka kantor distrik maupun kantor lokal, terutama di daerah pedesaan yang terpencil, kesadaran umum akan NHRI dan pelayanan yang diberikan olehnya sudah lebih tinggi.

NHRI yang berhasil mengkomunikasikan apa yang mereka bela dan tawarkan dengan persyaratan sederhana dan mudah dipahami. Ini memungkinkannya menjalin hubungan baik dengan kelompok rentan dan lembaga masyarakat sipil lainnya serta dengan masyarakat yang lebih luas. Penggunaan media secara efektif juga penting. Agar dapat diakses NHRI perlu bekerja dalam bahasa lokal.

Ini berarti merekrut staf dengan ketrampilan bahasa, menerbitkan dokumen dalam bahasa lokal dan memungkinkan para pengadu untuk berkomunikasi dalam bahasa mereka sendiri. Beberapa NHRI melakukan ini dengan baik, beberapa lainnya tidak.

### Kaitan

NHRI berada di persimpangan jalan antara pemerintah dan masyarakat sipil. NHRI perlu mendefinisikan dan membatasi ruang yang mereka huni sehubungan dengan berbagai lembaga lain yang melindungi hak asasi manusia, di dalam maupun di luar pemerintahan. Agar dapat beroperasi dengan baik, NHRI perlu benar-benar independen terhadap lembaga eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk peradilan, namun kesemuanya harus mempunyai akses pada dan pengaruh dalam lembaga bersangkutan.

NHRI yang efektif juga bekerja-sama dengan baik dengan lembaga masyarakat sipil, sambil tetap independen terhadap mereka. Ornop memainkan peran vital dalam mengidentifikasi dan menyalurkan pengaduan.

Banyak NHRI pembiayaannya buruk dan ini mengurangi baik sifat independennya serta ke-efektifannya. Organisasi internasional mempunyai peran penting untuk dimainkan dalam memperkuat NHRI dari segi keuangan maupun secara organisasional. NHRI harus mengelola anggarannya sendiri, yang harus mendapat dukungan suara oleh lembaga eksekutif independen. NHRI harus menjalani pemeriksaan keuangan secara reguler.

Akhirnya, tampaknya pekerjaan NHRI paling efektif bilamana beroperasi dalam kerangka kerja demokratis yang berfungsi. Ketiadaan kekerasan politis dan etnis, penerimaan aturan hukum, sifat independen peradilan, dan kerangka kerja demokratis atau yang mendemokratisasi menciptakan kondisi paling menguntungkan bagi lembaga nasional yang efisien. Mereka yang bekerja dalam lingkungan NHRI, dan mereka yang mendukung NHRI dari segi keuangan dan kelembagaan, perlu memfokuskan perhatian pada usaha menciptakan kondisi ini jika mereka menginginkan NHRI menjadi subur dan efektif pada jangka panjang.

Rekomendasi berikut dirancang agar berguna bagi lembaga nasional dinegara yang dipelajari dan lebih luas lagi. Laporan ini memuat daftar rekomendasi terperinci.

## REKOMENDASI PERTAMA

Lembaga nasional hak asasi manusia harus mendefinisikan peran mereka dengan jelas sehubungan dengan lembaga pemerintah dan lembaga peradilan dan dalam kaitan dengan organisasi sukarela dan masyarakat rentan

NHRI berdiri diantara pemerintah dan masyarakat sipil. NHRI harus melengkapi, bukan menggantikan pekerjaan badan lain.

Terutama, NHRI tidak boleh menggantikan fungsi pengadilan. Di mana NHRI melakukan fungsi investigatif, maka NHRI harus mempunyai wewenang untuk mengadakan tuntutan atau kasus yang dikemukakan oleh NHRI harus secara otomatis dituntut melalui pengadilan.

NHRI harus memperlihatkan secara konsisten bahwa lembaga ini tidak tergantung pada eksekutif. Pengertian umum mengenai status NHRI dapat dengan mudah dikacaukan oleh banyaknya kaitan yang dimiliki NHRI dengan pemerintah (mengenai pengangkatan, pembiayaan, tuntutan, dan lain-lain).

NHRI tidak boleh berbicara untuk pemerintahnya pada pertemuan internasional. Status internasional NHRI harus berbeda dari status pemerintah maupun status ORNOP.

Ornop dan organisasi masyarakat sipil harus terwakili di NHRI dan dikonsultasi secara reguler. Ornop dan organisasi tersebut merupakan sumber informasi yang penting dan memainkan peran berharga yang bersifat praktis dalam mengidentifikasi berbagai isu dan kasus. Ornop tidak boleh mengacaukan peran mereka dengan peran NHRI.



## REKOMENDASI KEDUA

Lembaga nasional hak asasi manusia harus beralih dari pendekatan yang berasal dari pengaduan ke pendekatan yang berasal dari program

Bagi banyak NHRI pendekatan berasal dari pengaduan tidak akan berkesinambungan. Pendekatan tematis akan memungkinkan NHRI mengkonsentrasikan sumber dayanya pada bidang kebutuhan akut, sambil meningkatkan akuntabilitas dan komunikasi dengan publik. Pengaduan individuil tidak boleh diabaikan namun sasarannya haruslah memfokuskan sumber daya di mana kebutuhannya adalah yang terbesar. Staf harus mengaitkan tindakan guna menyelesaikan kasus individuil dengan kebijakan pencegahan umum.

Prioritas harus diidentifikasi dengan berkonsultasi dengan pemerintah. Karena Ornop mempunyai keahlian khusus dan kaitan yang erat dengan kelompok rentan, NHRI harus bersedia menerima saran dari Ornop pada saat menetapkan prioritas dan selama penyelidikan.

Setelah sekian lama, NHRI dapat secara bermanfaat membentuk model penyidikan umum. Ini dapat menyoroti dan menganalisa berbagai isu hak asasi manusia serius, menempatkan subyek utama pada agenda nasional melalui laporan kepada parlemen dan media, dan menimbulkan tekanan politis maupun umum dalam jangka panjang.

## REKOMENDASI KETIGA

Lembaga nasional hak asasi manusia harus mendorong konsultasi dan partisipasi

NHRI harus berkonsultasi secara umum mengenai keputusan penting seperti pengangkatan eksekutif senior dan seleksi prioritas program. Usaha terutama harus dilakukan untuk berkonsultasi dengan kelompok rentan dan ORNOP dengan keahlian dalam bidang hak asasi manusia.

NHRI umumnya harus merekrut lebih banyak wanita dan wakil dari kelompok rentan (terutama minoritas) untuk posisi eksekutif senior maupun posisi staf. NHRI harus pula merekrut lebih banyak staf dari ORNOP hak asasi manusia.

Lembaga multi-anggota agar mempromosikan keanekaragaman dan membantu meningkatkan legitimasi NHRI. Dianjurkan agar dibentuk dewan pengatur yang kuat dan beragam.

Pemerintah harus berkonsultasi secara luas, terutama dengan Ornop, sebelum mendefinisikan mandat, keanggotaan, dan struktur NHRI yang baru.

## REKOMENDASI KEEMPAT

Lembaga nasional hak asasi manusia harus memastikan bahwa para eksekutif dan staf senior memenuhi syarat, mempunyai komitmen, representatif dan independen

Seluruh jajaran lembaga harus mempunyai ketenteraman mengenai masa jabatan. Prosedur harus menghindari konflik kepentingan selama dan juga setelah masa jabatan masing-masing anggota staf lembaga.

Cabang eksekutif tidak boleh mengendalikan prosedur pengangkatan, yang harus terlihat sebagai melibatkan konsultasi terbuka dan adil dengan masyarakat sipil.

## REKOMENDASI KELIMA

Badan internasional yang mengkoordinasi atau membiayai pekerjaan lembaga nasional hak asasi manusia harus membantu lembaga ini agar dapat berfungsi secara efektif.

Selama tahun 1990an, para donor dan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia telah mendorong pembentukan banyak NHRI baru. Banyak yang bagaimanapun juga kekurangan dana dan tidak dapat bekerja secara efektif. Tidak bijak untuk mempromosikan pembentukan lembaga baru sedangkan banyak badan yang sudah ada tidak dapat berfungsi dengan baik. Pendanaan yang dapat diandalkan merupakan hal yang penting.

Bilamana mendanai NHRI, para donor harus memastikan bahwa sumber daya tidak dialihkan dari lembaga lain yang melindungi has asasi manusia, terutama lembaga peradilan.

Sebelum mendukung NHRI baru, para donor harus memastikan bahwa pemerintah telah menyusun pengaturan pembiayaan yang memadai bagi NHRI bersangkutan selain prosedur pelaporan yang terbuka. Para donor harus memastikan pula bahwa pemerintah berkonsultasi secara umum sebelum membentuk NHRI yang baru.

Bilamana memberikan saran atau menyelenggarakan pelatihan pada lembaga nasional, para donor harus memanfaatkan keahlian yang tersedia di negara yang mempunyai pengalaman ekonomi, sosial, dan politik yang serupa.

## REKOMENDASI KEENAM

Lembaga nasional hak asasi manusia harus menangani hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kemiskinan, dan akses tidak merata pada penyediaan fasilitas pendidikan, perumahan dan kesehatan, semakin menentukan perkembangan sosial dan mutu kehidupan. NHRI tidak dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok rentan tanpa menangani hak ekonomi, sosial, dan budaya (ESC=Economic, Social and Cultural). Beberapa kelompok telah berbuat demikian, namun banyak yang belum menempatkan sumber daya ke dalam hak ESC atau menghadapinya dengan serius.

NHRI yang baru harus meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam mandatnya. NHRI yang mandatnya belum meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya harus mempertimbangkan perancangan kembali mandatnya untuk berbuat demikian.

Strategi praktis dapat meliputi:

- mengidentifikasi kawasan eksklusi dan penyusunan usulan kebijakan untuk menanggulangi kawasan demikian;
- memantau kebijakan pemerintah sehubungan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya;
- menangani kasus yang memperluas akses pada hak ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- mengidentifikasi cara untuk membuat hak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi dapat dibenarkan.

## REKOMENDASI KETUJUH

Lembaga nasional hak asasi manusia harus menjadi lebih aksesibel

NHRI harus meningkatkan akses umum dengan menempatkan kantor di kota propinsi dan di daerah miskin atau daerah yang terlalaikan. Sejauh mungkin, NHRI harus menghindari menempatkan kantor di kawasan eksklusif atau gedung pemerintah bilamana berbuat demikian dapat membuat kelompok rentan menjadi jera.

NHRI harus menciptakan prosedur yang telah disederhanakan guna memastikan akses oleh kelompok rentan. NHRI harus dapat menerima pengaduan secara lisan, dan berkomunikasi dalam bahasa minoritas.

Akses akan ditingkatkan di mana NHRI mempublikasikan prioritas dan kerja kasusnya secara efektif.

## REKOMENDASI KEDELAPAN

Lembaga nasional hak asasi manusia harus mengevaluasi kinerjanya

NHRI harus setiap tahun menyatakan prioritasnya dan mengidentifikasi kelompok rentan yang akan diberi kesempatan meminta pelayanannya. NHRI harus menjelaskan bagaimana hak kaum wanita akan ditangani dan bagaimana kebijakan akan disusun dengan berkonsultasi dengan semua pelaku yang relevan, termasuk organisasi masyarakat sipil.

NHRI harus menjaga agar statistik pekerjaan kasus tidak terkumpul menjadi satu guna menunjukkan bagaimana lembaga bersangkutan menangani prioritas maupun kelompok rentan yang telah diidentifikasi.

NHRI harus mengevaluasi pekerjaannya setiap tahun, terhadap sasaran programnya, termasuk keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan kelompok rentan yang telah diidentifikasi.

## DEWAN INTERNASIONAL MENGENAI KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA (International Council on Human Rights Policy)

Dewan Internasional mengenai Kebijakan Hak Asasi Manusia dibentuk di Jenewa pada tahun 1998 guna melaksanakan penelitian terapan ke dalam berbagai isu hak asasi manusia dewasa ini. Penelitiannya dirancang agar mempunyai relevansi praktis bagi para pembuat kebijakan, dalam lingkungan organisasi internasional maupun regional, dalam pemerintahan maupun badan antar-pemerintah, dan dalam organisasi sukarela dari berbagai jenis. Dewan bersifat independen, internasional dalam hal keanggotaannya, dan partisipatoris dalam hal pendekatannya. Dewan terdaftar sebagai yayasan nirlaba di bawah undang-undang Swiss.

### PARA ANGGOTA DEWAN INTERNASIONAL

Abdullahi An-Na'im	Profesor Hukum, Universitas Emory, Fakultas Hukum, Atlanta, Georgia. Sudan.
Carlos Basombrio*	Direktur, Lembaga Pembelaan Hukum, Lima. Peru.
Ligia Bolivar	Pendiri, Program Pembelaan Hukum, Program Venezuela untuk Pendidikan dan Aksi Hak Asasi Manusia (PROVEA).
Theo van Boven	Profesor Hukum Internasional, Universitas Maastricht; Anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Negeri Belanda.
William Burklé*	Mantan bankir; Anggota Dewan dari Migros. Swiss.
Antonio Cancado Trindade	Hakim, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika; Profesor Hukum Internasional, Universitas Brasilia, Brazil.
Stanley Cohen*	Profesor Sosiologi, Sekolah Ekonomi London, Inggris.
Radhika Coomaraswamy	Special Rapporteur PBB mengenai Kekerasan terhadap Wanita; Direktur, Pusat Internasional untuk Studi Etnis, Kolombo, Sri Lanka
Yash Ghai*	Profesor Hukum Publik Sir Y.K. Pao. Hong Kong
Thomas Hammarberg*	Duta Besar. Swedia.
Bahey El Din Hassan	Direktur, Lembaga Kairo untuk Studi Hak Asasi Manusia, Mesir.
Ayesha Imam*	Koordinator, Jaringan Solidaritas Internasional Kaum Wanita yang Tinggal di bawah Hukum Muslim, Kawasan Afrika Barat. Nigeria.
Hina Jilani*	Direktur, Sel Bantuan Hukum AGHS, Lahore. Pakistan.
Virginia Leary	Profesor Hukum Berjasa Istimewa, Universitas Negara Bagian New York di Buffalo. Amerika Serikat.
Goenawan Mohamed	Penyair; Pendiri dan mantan Redaksi majalah Tempo. Indonesia.
Bacre Waly Ndiaye	Pengacara; Direktur Kantor Komisaris Tinggi PBB mengenai Hak Asasi Manusia di New York. Senegal.
Margo Picken	Associate Fellow di Pusat untuk Kajian Internasional, Sekolah Ekonomi London. Inggris.
N. Barney Pityana	Ketua, Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan. Afrika Selatan.
Daniel Ravindran	Pendiri, Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan (Forum Asia). India
Dorothy Thomas	Konsultan, Yayasan Shaler Adams. Amerika Serikat.
Renate Weber	Co-Presiden, Komite Helsinki Rumania. Rumania

\*Anggota Dewan Eksekutif

## KINERJA & LEGITIMASI: LEMBAGA NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

### Cara memesan laporan utama

Laporan utama dan eksemplar tambahan Ikhtisar (dalam empat bahasa) dapat dipesan dari Dewan Internasional.

#### Laporan Utama

*Kinerja & legitimasi: lembaga nasional hak asasi manusia* – Laporan Utama, International Council on Human Rights Policy, 2000, ISBN 2-940259-03-8, 148pp. 165mm x 220mm. Tersedia dalam bahasa Inggris. Fr.36,--(+Fr.3,--p.&p.).

#### Ikhtisar temuan

*Kinerja & legitimasi: lembaga nasional hak asasi manusia – Ikhtisar Temuan*, International Council on Human Rights Policy, 2000, 12 hal., 165mm x 220mm. Tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol & Indonesia. Fr. 10,--(+p.&p.)

#### Publikasi lain oleh dewan

*Menangani Kewajiban dengan Serius: Kewajiban Individual dalam Hukum Hak Asasi Manusia – Sebuah Komentar*, International Council on Human Rights Policy, 1999, ISBN 2-940259-00-3, 80 hal., 165mm x 220mm. Kini tersedia dalam bahasa Inggris. Fr.13,50(+Fr.3,--p.&p.).

*Kasus berat: membawa para pelanggar hak asasi manusia ke pengadilan di luar negeri – yurisdiksi universal*, International Council on Human Rights Policy, 1999, ISBN 2-940259-01-1, 72 hal., 165mm x 220mm. Tersedia dalam bahasa Inggris. Fr.15,-- (+ Fr.3,--p.&p.).

#### Publikasi mendatang

*Keuletan dan Mutasi Rasisme*, International Council on Human Rights Policy, 2000, ISBN 2-940259-09-7. Publikasi: April 2000. Harga: Fr.15,--+p.&p.

*Bantuan hak asasi manusia*, International Council on Human Rights Policy, 2000, ISBN 2-940259-04-6. Publikasi: Juni 2000. Harga: FR.36,--+p.&p.

*Tujuan dan cara: pendekatan hak asasi manusia pada kelompok bersenjata*, International Council on Human Rights Policy, 2000, ISBN 2-940259-02-X. Publikasi: Juli 2000. Harga: Fr.36,--+p.&p.

Dewan Internasional dengan gembira akan membuka rekening untuk perorangan maupun organisasi yang ingin memesan sejumlah eksemplar publikasi dan laporan yang diterbitkannya. Untuk membuka rekening, harap hubungi Sekretariat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Program Penelitian Dewan, harap hubungi Sekretariat.

## KESIMPULAN

Proliferasi pesat – terkadang tidak teratur – NHRI selama tahun 1990an tampaknya akan berlanjut. Banyak yang diharapkan dari NHRI dan terkadang NHRI mengecewakan, terkadang NHRI melampaui harapan. Banyak yang beroperasi dalam lingkungan kelembagaan yang tidak menguntungkan. Banyak yang kekurangan uang, kurang representatif atau berada di bawah pengaruh politik. Namun buktinya menunjukkan bahwa, bahkan ketika NHRI dibentuk untuk keperluan kosmetik, NHRI dapat menembus batasan politik yang semula dikenakan atasnya. Meskipun ada beberapa NHRI yang gagal, beberapa lainnya telah membuktikan kemampuan mereka untuk memperdalam respek umum maupun resmi atas hak asasi manusia.

Guna memenuhi tanggung jawabnya dengan baik, NHRI perlu menjalin ikatan loyalitas dan kerja-sama dengan publik lebih luas dan terutama dengan kelompok yang sedang dicoba untuk dibantu dan dengan organisasi masyarakat sipil yang berkerja untuk tujuan yang sama. Ke-efektifan juga tergantung pada kemampuan NHRI untuk melengkapi dan memperkuat – bukan menggantikan atau bersaing dengan – lembaga resmi, terutama peradilan, yang menyediakan pelayanan lain yang penting bagi perlindungan hak asasi manusia.

Kesemua pelaku yang berbeda ini perlu mempunyai harapan realistis mengenai apa yang dapat dicapai oleh NHRI. Mereka mempunyai peran khusus dan melengkapi. Terkadang dinyatakan bahwa demokrasi industri tidak perlu menciptakan NHRI karena masyarakat bersangkutan lebih jarang melanggar hak asasi manusia dan sistem pengadilan mereka dapat menangani masalah demikian ketika timbul. Sesungguhnya mekanisme yang ditawarkan oleh lembaga nasional hak asasi manusia sama bergunanya di negara maju seperti di tempat lain.

Prinsip Paris menetapkan standar minimum yang penting. Pada tahun mendatang, kesemua ini akan perlu diperdalam dan diperluas ketika NHRI berkembang dalam lingkungan yang berubah. Dari segi keuangan, semua NHRI harus menjadi lebih mandiri. Banyak yang perlu memperoleh legitimasi sosial yang lebih dalam. Penelitian ini telah menunjukkan bagaimana NHRI dapat berbuat lebih banyak dari pada hanya menyelidiki dan menyelesaikan pengaduan secara berhasil. Mereka mempunyai peran vital yang dapat dimainkan dalam melegitimasi dan mengkomunikasikan nilai hak asasi manusia dalam masyarakat dan dalam memperluas perlindungan dan bantuan kepada kelompok rentan.